

MANAJEMEN KOLABORASI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SITU RAWA GEDE BERBASIS MASYARAKAT DAN BERKELANJUTAN DI KOTA BEKASI

Edy Suswanto ¹

¹PT. Tetira International Consultants
Email: e_edsus@yahoo.com

Abstrak

Hasil dari penelitian ini fokus pada isu-isu kebijakan, pedoman, implementasi, dan harapan untuk pemanfaatan danau berbasis masyarakat untuk danau yang berkelanjutan di Kota Bekasi. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis penggunaan danau, baik dari segi manfaat pariwisata, maupun dari penampungan air dan upaya pengendalian banjir melalui analisis kebijakan. Evaluasi program yang digunakan oleh para peneliti adalah model evaluasi Grindle yang mencakup formulasi kebijakan komponen evaluasi, implementasi program, alokasi sumber daya dan target hasil. Evaluasi terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 tahun 1974 tentang Irigasi dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2011 hingga 2031. Evaluasi program terkait dengan kegiatan proses normalisasi, keamanan aset / pemeliharaan, pengembangan wisata air dan pengendalian banjir. Evaluasi alokasi sumber daya terkait dengan aktivitas pendanaan. Evaluasi Target Outcome terkait dengan hasil kebijakan yang mencakup pemeliharaan aset sumber daya air dan pengendalian banjir. Analisis ini mencoba untuk mendekati strategi yang perlu dipertimbangkan: manajemen pariwisata danau berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Hasil analisis menunjukkan perlunya pengelolaan kolaboratif di antara para pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah lokal dan komunitas lokal) dalam pengelolaan situs secara berkelanjutan. Pembiayaan tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi dapat diupayakan melalui parthnership swasta publik.

Kata kunci: danau, wisata alam, manajemen kolaboratif

Abstract

The results of this study focus on policy issues, guidelines, implementation, and expectations for community based on lake utilization in order to sustainable lakes in Bekasi City. This paper showed the analyze the use of lakes, both in terms of tourism benefits, as well as from water reservoir and flood control efforts through policy analysis. Evaluation of the program used by the researchers is Grindle evaluation model that includes the evaluation component policy formulation, programs implementation, resources allocation and target of outcomes. The evaluation related to Water Resources management policy and guidance as stated in Law no. 11 of 1974 on Irrigation and Lokal Regulation No. 13 Year 2011 on RTRW Kota Bekasi Year 2011 up to 2031. Evaluation of programs related to normalization process activities, security of assets/ maintenance, development of water tourism and flood control. Evaluation of resources allocation related to financing activities. Target Outcomes evaluation is related to policy outcome which includes maintenance of water resource asset and flood control. This analysis tries to approach a strategy to consider: sustainable lake tourism management that benefits all parties, both government and society. The results of the analysis showed the need for collaborative management among stakeholders (government, lokal government and lokal communities) in sustainable management of the site. The financing is not only the responsibility of the government but also can be pursued through public private parthnership.

Keywords: lake, nature tourism, collaborative management

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU No. 32 Th 2009). Situ sebagai salah satu sumber daya alam sepatutnya dalam pengelolaannya dilaksanakan secara Sistematis, Terpadu dan Lestari. Sistematis yang berarti pengelolaan situ baik kualitas dan kuantitas dilakukan secara menyeluruh termasuk pengelolaan sempadannya. Terpadu, yang berarti dalam pengelolaan dan pembangunannya banyak aspek dan komponen yang terkait seperti bidang pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. Lestari, yang berarti pengelolaannya berwawasan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dengan wilayah hidrologi atau ekologi sebagai kesatuan pengelolaan.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan situ agar dapat berkelanjutan adalah sebagai berikut: Penelitian oleh Malgorzata Kurlito (pol. J. Nature Sc. 2013) tentang Pengelolaan Danau/Situ Berkelanjutan Memper-timbangkan Pariwisata dan Aspek

Konservasi di Australia dan New Zealand. Hasil penelitian menampilkan efek negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan wisata di danau. Dalam rekomendasinya diungkapkan strategi untuk mengatasi efek negatif yaitu dengan menggunakan strategi zonasi pariwisata (Tourist Zonasi) (Kurlito, 2013).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sandor Nemethy tentang Pengelolaan Berkelanjutan Danau di Dalam Hubungannya dengan Mitigasi Efek Perubahan Iklim, Pertanian dan Pembangunan Daerah Mikro Hijau Berdasarkan Produksi Energi Terbarukan. Hasil penelitian bahwa perubahan iklim sangat mempengaruhi kondisi lingkungan danau. Dampak buruk tersebut disebabkan oleh fluktuasi tingkat air serta faktor yang disebabkan oleh manusia seperti pencemaran lingkungan dari pembuangan air limbah dan pertanian skala besar yang menghilangkan lahan basah yang berharga. Penelitian ini juga menganalisa faktor-faktor kunci pembangunan daerah di sekitar danau (Nemethy, 2014).

Penelitian George E Otiang'a, 2006 tentang Dampak Manusia Terhadap Ekosistem Danau: Kasus Danau Naivasha, Kenya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kegiatan pertanian dan peternakan di area tangkapan air seluas 3.376 km² menjadi ancaman bagi ekosistem danau. Sedangkan Danau Naivasha adalah lahan

basah yang memiliki kepentingan nasional dan internasional (Otiang'a, 2006).

Dalam penelitian Pengelolaan Situ Berkelanjutan sebagai Sumber Daya di Kota Depok ditemukannya peran serta dari Kelompok Kerja yang mempunyai tugas untuk mengendalikan, pengamanan dan pelestarian fungsi situ-situ. Kelompok kerja ini ditetapkan melalui SK Walikota Kepala Daerah Tingkat II Depok (Maryanti, 2014).

Dalam penelitian lain di Danau Victoria Kenya di terapkan system Asset-based Community Development (ABCD) yang dikombinasikan dengan public participatory GIS (PPGIS). Metode ini dilakukan karena anggota masyarakat memungkinkan untuk lebih baik mengkomunikasikan tataruang mereka dalam berbagai dimensi dan hubungannya dengan tanah miliknya. Penelitian ini telah menghasilkan seperangkat peta yang dirancang dan didorong oleh anggota masyarakat yang tidak hanya menunjukkan aset di dalam masyarakat tetapi juga hubungan antara warga negara terhadap aset mereka, serta mendorong pemahaman sederhana tentang titik, garis dan polygon (Michael, et. al, 2012).

Dalam Visi Danau Dunia (FDI, 2004) disebutkan selain untuk memenuhi kebutuhan air bagi ekosistem akuatis yang memiliki nilai ekonomi, danau juga berfungsi sebagai sumber air utama bagi

kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, danau sangat peka pada dampak kegiatan manusia. Dengan demikian, kegiatan atau strategi yang diarahkan pada pemanfaatan danau serta sumberdaya yang terdapat didalamnya secara berkelanjutan harus dilandasi oleh azas-azas yang berakar pada pengertian keberlanjutan itu sendiri. Pengelolaan danau secara berkelanjutan menghendaki diselesaikannya konflik antara berbagai pihak yang berkompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada di danau dengan mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta kepentingan alam (KLH, 2014).

Pada penelitian yang dilakukan di Australia dan Newzeland oleh Malgorzata Kurleto dengan judul Pengelolaan Danau yang Keberlanjutan dengan Mempertimbangkan Pariwisata dan Konservasi Alam. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan aktivitas kewirausahaan dalam memahami dinamika ekonomi wisata dengan skala perlindungan ekosistem danau. Memahami proses yang tepat dari danau wisata sangat penting untuk pemahaman yang lebih baik dalam perencanaan masa depan ekonomi dari danau (Malgorzata, 2013).

Sebuah studi kasus di Danau Bosomtwe Basin di Ghana membandingkan kebijakan pengembangan

wisatawan dengan praktiknya/pelaksanaannya. Studi ini menyelidiki apakah pengembangan pariwisata di danau Bosomtwe Basin berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan yang diterapkan. Hasil studi menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara kebijakan dan praktiknya. Pengembangan pariwisata bersifat *ad hoc*, serampangan dan nampaknya tidak berkelanjutan. Kegiatan pariwisata memiliki hubungan yang lemah terhadap sektor ekonomi lokal lainnya. Sistem drainase air dan saluran pembuangan dari fasilitas pariwisata belum diintegrasikan ke dalam sistem masyarakat, sehingga pembuangan limbah tidak tepat (Abdulaikuyini, 2014).

Penelitian lain tentang pengembangan danau untuk tujuan wisata dan rekreasi, dan dampaknya terhadap beban lingkungan alam di zona garis pantai dilakukan di danau Drweckie Ostrada. Hasil analisis menunjukkan pengembangan dan pengelolaan lahan untuk tujuan wisata dan rekreasi di sekitar danau Drweckie di batas kota Ostrada berakibat pada zona darat dan perairan sangat terbebani karena ruang yang padat dan aktivitas turis dan rekreasi yang semakin intensif (Katarzyna et al, 2017).

Sebuah studi kasus terkait Proyek investasi infrastruktur publik pengembangan jaringan jalur air di danau distrik Puula Kyyvesi, Finlandia bertujuan

untuk mengukur sejauh mana infrastruktur tersebut dimanfaatkan untuk pemasaran berbagai hal yang berhubungan dengan kepariwisataan. Hasil studi menunjukkan infrastruktur jaringan jalur air yang telah dibangun tidak efektif digunakan untuk pengembangan kepariwisataan dan sebagai konsekuensinya tidak ada pengaruh besar pada peningkatan wisatawan yang dapat diharapkan (Lehtolainen, 2010).

Penelitian oleh Moges Gebreegziaber Woldu tentang Hubungan yang hilang antara pemangku kepentingan dan implikasinya terhadap industri pariwisata di Wilayah Amhara Ethiopia. Penelitian ini menilai praktik Pariwisata berbasis masyarakat (CBT). Hasilnya menunjukkan, Danau Tana memiliki potensi pemandangan alam dan peninggalan sejarah buatan manusia juga menjadi rumah bagi sumberdaya flora dan fauna endemic dan memiliki sekitar 37 pulau dan 20 pulau ini memiliki tempat-tempat suci dan warisan lainnya. Namun dengan semua potensi ini, praktik pariwisata berbasis masyarakat yang inklusif tidak ada di koridor pertumbuhan (Moges, 2016).

Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menjaga situ-situ yang ada sangat diperlukan hal ini terkait dengan pemberian ijin-ijin pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Situ sebagai daerah

konservasi air, seharusnya tidak boleh di huni karena ada aturan yang mengatur daerah sempadan situ yang tidak boleh dibangun yakni dalam jarak 50 meter dari bibir Situ untuk diluar kota dan 15 meter untuk Situ yang berada di dalam kota (http://pu.go.id.dirjen_sda 2014).

Begitu juga yang terjadi di Kota Bekasi, dengan berkembangnya penduduk serta berbagai kepentingan, lahan penampung air yang berfungsi membantu keseimbangan proses daur hidrologi yang dikenal sebagai situ banyak yang mengalami perubahan fungsi menjadi pemukiman dan malahan ada yang menjadi kawasan industri. Selain itu, ada yang ditimbun (diurug) bahkan menjadi tempat pembuangan sampah. Pengalihan fungsi tersebut tentunya akan merusak keanekaragaman hayati ekosistem situ yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya kualitas maupun kuantitas dan hilangnya tempat penampungan air sebagai salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat.

Situ yang mempunyai fungsi utama sebagai daerah resapan air sepatutnya juga dapat digunakan sebagai sarana olah raga, tempat rekreasi, dan juga dapat berfungsi sebagai tempat budidaya ikan (keramba ikan). Situ juga diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat sekitar bila pengelolaannya dilakukan terintegrasi dan

berkesinambungan dengan pola penataan yang baik.

Esensi penelitian ini fokus pada masalah kebijakan, pedoman, pelaksanaan, dan harapan untuk pemanfaatan/pengelolaan situ berbasis masyarakat dalam rangka menuju situ yang berkelanjutan di Kota Bekasi, serta bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan agar pemanfaatan/pengelolaan situ berbasis masyarakat menuju situ yang berkelanjutan dapat berjalan.

Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan/pengelolaan situ berbasis masyarakat dalam rangka menuju situ yang berkelanjutan memerlukan kerjasama stakeholder khususnya antara pemerintah daerah sebagai pihak yang akan mengatur pola pemanfaatannya dan pemerintah pusat sebagai pengelola asset serta masyarakat sebagai pemanfaat.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan, Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Policy Research*. Dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif dengan model evaluasi yang dikembangkan oleh Grindle (1980). Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai

realitas dan proses sosial yang akan diteliti. Serta tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya bagian dari suatu keseluruhan.

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai peneliti karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Oleh karena

itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Acuan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Sebagai acuan dari evaluasi Pelaksanaan kebijakan Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 khususnya yang menyangkut pengelolaan Sumber Daya Air termasuk situ-situ yang ada di Kota Bekasi.

Tabel 1.
Acuan Evaluasi Kebijakan

Komponen	Aspek	Butir Pernyataan	Jumlah Pernyataan
Formulasi Kebijakan	1. Kebijakan penataan ruang termasuk mengatur keberadaan Situ Gede	1	1
	2. Pedoman untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	2	1
Pelaksanaan Program	1) Normalisasi	21, 22, 23, 24	4
	2) Pengamanan Asset	-	-
	3) Revitalisasi	34, 35, 37	3
	4) Kegiatan Pariwisata	41, 42, 43, 44	4
	5) Pengendalian Banjir	45, 46, 47, 48	4
Alokasi Sumberdaya	Pembiayaan	15, 16, 17, 18, 19, 20	6
Outcomes (Manfaat)	1) Asset yang terpelihara	49, 50	2
	2) Situasi Banjir Terkendali	53, 54	2

Desain Penelitian

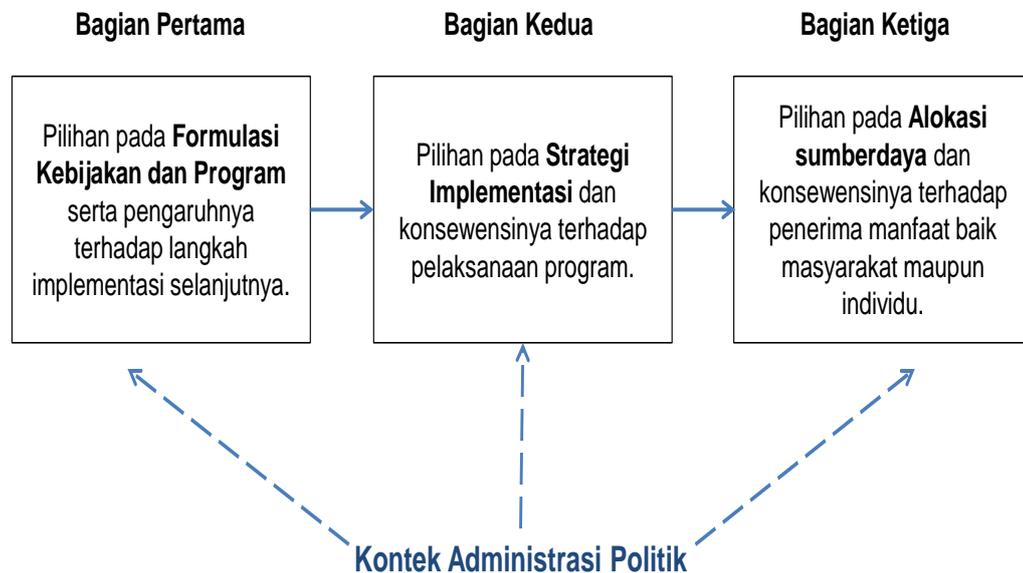
Evaluasi program yang digunakan oleh peneliti adalah model evaluasi Grindle (1980) yang mencakup komponen evaluasi *formulasi kebijakan, Pelaksanaan Program, Alokasi Sumberdaya* dan Target *Outcomes*. Formulasi kebijakan berkaitan dengan Perda No. 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi, didalamnya mengatur pengembangan sistem jaringan drainase

dan pengendalian banjir melalui pengelolaan situ-situ.

Pelaksanaan program berkaitan dengan kegiatan proses normalisasi, Pengamanan asset/ pemeliharaan, pengembangan pariwisata air dan pengendalian banjir. Alokasi sumberdaya menyangkut pembiayaan. Target outcomes berkaitan dengan hasil capain kebijakan yang meliputi terpeliharanya asset sumber

daya air dan Situasi di sekitar situ terkendali.

Desain penelitian evaluasi kebijakan sesuai model evaluasi Grindle (1980) sebagai berikut:



Gambar 1.
 Desain Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA (situ) di Kota Bekasi dengan Metode Grindle

Teknik Analisa Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan situ berbasis masyarakat dalam rangka menuju situ yang berkelanjutan di Kota Bekasi dilihat dari kesesuaian dengan aspek *formulasi kebijakan, pelaksanaan program, alokasi*

sumberdaya dan *target outcomes*. Data penelitian yang diperoleh selanjutnya dilakukan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Pendeskripsian data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif.

Teknik analisis data akan dilakukan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2
 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Tahapan Evaluasi	Aspek yang Dievaluasi	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Analisi Data
<i>Formulasi Kebijakan</i>	1. Kebijakan pemanfaatan ruang melalui pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir termasuk mengatur keberadaan Situ Gede 2. Pedoman untuk strategi pelaksanaan kebijakan melalui pelaksanaan program	Bappeda Kota Bekasi; Dinas PUPR Kota Bekasi	Studi Dokumen, Wawancara, Angket penelitian	Deskriptif
<i>Pelaksanaan Program</i>	1. Normalisasi 2. Pengamanan Aset/Pemeliharaan 3. Revitalisasi	BBWCSS, Bappeda Kota Bekasi, Dinas PUPR Kota Bekasi, Dinas Lingkungan	Wawancara, Angket Penelitian	Deskriptif

	4. Pengembangan Pariwisata Berbasis SDA (Situ) 5. Pengendalian Banjir	<i>Hidup Kota Bekasi, Dinas Pariwisata Kota Bekasi</i>		
<i>Alokasi Sumberdaya</i>	Pembiayaan	<i>BBWCSS, Bappeda Kota Bekasi, Dinas PUPR Kota Bekasi</i>	<i>Wawancara, Angket Penelitian</i>	Deskriptif
<i>Target Outcomes</i>	1. Aset terpelihara 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Situasi Banjir Terkendali di sekitar situ	<i>BBWCSS, Bappeda Kota Bekasi, Dinas PUPR Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dinas Pariwisata Kota Bekasi</i>	<i>Wawancara, Angket Penelitian</i>	Deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Situ Rawa Gede

Situ Rawa Gede merupakan salah satu situ alami yang berada di wilayah Kota Bekasi, yaitu di wilayah RW 01, 02 dan 03 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu. Pandangan awam melihat kondisi Situ saat ini pemeliharannya masih kurang optimal, air situ kotor karena banyak sampah,

bangunan-bangunan liar berdiri dipinggir situ antara lain gudang barang bekas.

Melihat potensi, letak geografis dan *trend* pasar yang ada, konsep pengembangan pariwisata Situ Rawa Gede dapat diarahkan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata rekreasi kuliner sebagai daya tarik utama dengan ditunjang aktivitas wisata tirta dan arena bermain anak-anak.

RENCANA SITU RAWA GEDE BOJONG MENTENG



Gambar 1.
 Rencana Revitalisasi Situ Rawa Gede (*Sumber: Dinas PUPR Kota Bekasi (2017)*)

B. Hasil Analisis Evaluasi Kebijakan

Target responden sebagai target angket penelitian dan wawancara mendalam (*in-depth Interview*) berasal dari

unsur Pemerinta Pusat, Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan masyarakat sekitar situ sebagai barikut:

Tabel 3.
 Daftar Informan Wawancara (*In-depth Interview*)

No	Nama Informan	Institusi/ SKPD	Posisi/ Jabatan
1	Yudi Saptono, ST. MT.	Bappeda Kota Bekasi	Kepala Bidang Infrastruktur Perencanaan Wilayah
2	Galuh, ST	Dinas PUPR Kota Bekasi	Pelaksana pada Dinas PUPR Kota Bekasi - Bidang Tata Ruang
3	Dra. Elly Sulaelah	Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bekasi	Kepala Seksi Sarana & Promosi Pariwisata
4	Ir. Heny Rushendarti	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	Kepala Seksi Kajian Lingkungan
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maulana Jaya ▪ Heri 	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasi Perencanaan Umum ▪ Kasi Perencanaan O&P
6	H. Nasro Dwiprana	Kelurahan Bojong Menteng, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi	Kaur Ekonomi dan Pembangunan

Adapun untuk responden penyebaran dan pengisian angket penelitian diberikan baik kepada unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah Kota Bekasi maupun

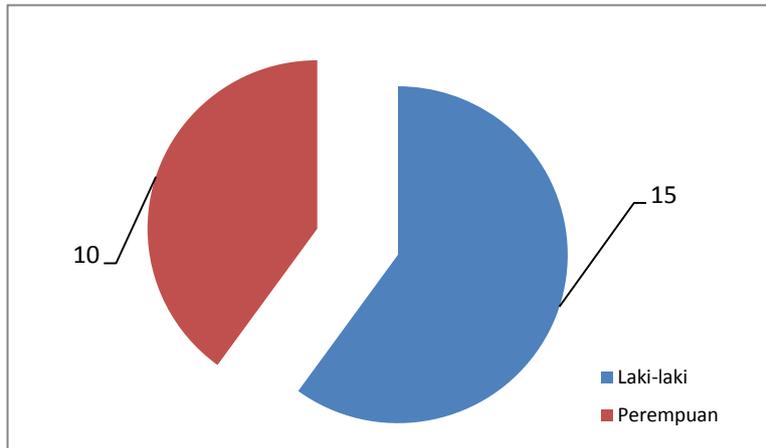
masyarakat yang berada disekitar lokasi Situ Rawa Gede dengan daftar responden sebagai berikut:

Tabel 4.
 Daftar Responden Pengisian Angket Penelitian

No	Sumber Informan/Responden	Jumlah Pengisian Angket Penelitian (Orang)
1	Bappeda Kota Bekasi	4
2	Dinas PUPR Kota Bekasi	3
3	Dinas Pariwisata Kota Bekasi	2
4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	2
5	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	3
6	Kelurahan Bojong Menteng	1
7	Masyarakat	10
TOTAL		25

Adapun profil data responden untuk pengisian angket penelitian dapat

digambarkan dalam grafik atau bagan sebagai berikut ini:

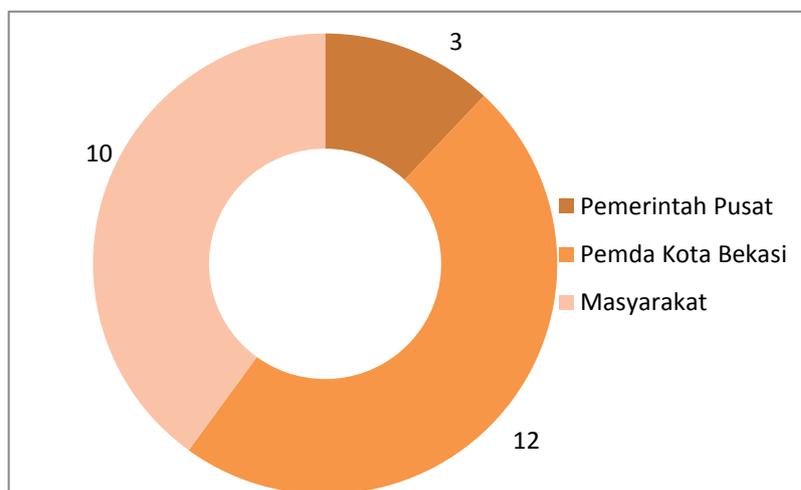


Gambar 2.
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebagian besar responden angket penelitian berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 10 orang. Jika dibagi

berdasarkan unsur institusi maka responden angket penelitian yang berasal dari Pemerintah Pusat ada 3 orang, Pemerintah Kota Bekasi ada 12 orang dan dari unsur masyarakat sebanyak 10 orang



Gambar 3.
Responden Berdasarkan Unsur/Institusi

Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model evaluasi Grindle (1980). Model evaluasi kebijakan Grindle (1980) menitik beratkan

pada 3 (tiga) bagian pilihan kritis dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu (1) bagian pertama terkait pilihan pada formulasi kebijakan dan program serta

pengaruhnya terhadap langkah implementasi selanjutnya; (2) bagian kedua terkait pilihan pada strategi implementasi dan konsekwensinya terhadap pelaksanaan program; (3) bagian ketiga pada pilihan alokasi sumberdaya dan konsekwensinya terhadap penerima manfaat baik masyarakat ataupun individu dalam masyarakat.

1) Formulasi Kebijakan dan Program

Kebijakan yang dievaluasi pada penelitian ini adalah Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang mengatur pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk didalamnya pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi yang dilakukan melalui strategi membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi situ-situ sebagai daerah penampungan air.

Mengacu pada model evaluasi Grindle, formulasi kebijakan yang dimaksud **kebijakan pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir**. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci yang terkait diperoleh informasi bahwa kebijakan yang dibuat sudah cukup jelas mengatur pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir. Pengembangan

sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada Perda tersebut dilakukan melalui pengelolaan situ-situ sebagaimana disampaikan Bapak Yudi Saptono (Bappeda Kota Bekasi), Bapak Galuh,ST (Dinas PUPR Kota Bekasi), Ibu Elly Sulaellah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi), Ibu Heny Rushendarti (Dinas Lingkungan Hidup) serta Bapak H. Nasro Dwiprana (Kaur Ekbang Kelurahan Bojong Menteng). Seluruh informan yang diwawancarai menyatakan bahwa kebijakan Perda Nomor 13 tahun 2011 sudah cukup jelas mengatur dan mengamankan pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir melalui pengelolaan situ-situ.

Hasil evaluasi melalui pengisian angket penelitian menunjukkan sebesar 64 persen responden menyatakan sesuai bahwa kebijakan Perda Nomor 13 tahun 2011 digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir melalui pengelolaan situ-situ. Sementara itu sebanyak 72 persen responden menyatakan sesuai bahwa kebijakan Perda Nomor 13 tahun 2011 digunakan sebagai landasan dasar dalam pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir melalui pengelolaan situ-situ.

Formulasi kebijakan yang dilakukan Pemda Kota Bekasi melalui Perda Nomor

13 tahun 2011 terkait pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir melalui pengelolaan situ-situ dinilai sudah tepat dan diterima oleh seluruh stakeholder baik aparat pemerintah (SKPD terkait) maupun masyarakat selaku penerima manfaat.

Kebijakan Perda Kota Bekasi melalui Perda Nomor 13 tahun 2011 terkait pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir melalui pengelolaan situ-situ masih sejalan dengan amanat UU Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan terutama pasal 11 ayat (1) bahwa Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk peningkatan kemanafaatannya bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik pusat dan daerah.

Situ juga termasuk unsur lingkungan hidup yang diatur pengelolaannya dalam Undang Undang No.23 tahun 1997. Kelestarian ekosistem situ sangat diperlukan untuk kesinambungan fungsi lingkungan hidup situ, yaitu sebagai habitat makhluk hidup pada perairannya serta manfaat sumber daya airnya bagi kehidupan manusia. Pada pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Sumberdaya Alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.

2) Strategi Implementasi Kebijakan

Selanjutnya konsep evaluasi kebijakan Grindle (1980), bagian kedua terkait fokus evaluasi pelaksanaan kebijakan adalah menyangkut strategi implementasi dimana dalam kebijakan Perda Nomor 13 tahun 2011 disebutkan strategi implementasi kebijakan dilakukan melalui membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi situ-situ sebagai daerah penampungan air. Jika menganalisis pada kasus Situ Rawa Gede dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi kebijakan sebagaimana yang dimaksud dalam perda tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program kegiatan yang diatur dalam Perda tersebut belum dapat terlaksana dengan baik. Sesuai amanat Perda Nomor 13 tahun 2011 bahwa kebijakan pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir yang dilakukan melalui membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi situ-situ sebagai daerah penampungan air melalui program-program, yaitu normalisasi, pengamanan asset, revitalisasi, kegiatan pariwisata dan pengendalian banjir. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dari 5 (lima) program kegiatan tersebut yang baru dilaksanakan adalah kegiatan normalisasi, pengamanan asset, rencana pengembangan pariwisata berbasis sumberdaya air, dan

kegiatan pengendalian banjir. Kegiatan normalisasi dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) karena merupakan kewenangan pusat. Pengamanan asset telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Bekasi bekerjasama dengan BBWSCC dengan melibatkan masyarakat sekitar situ melalui kegiatan pengukuran kembali dan pemasangan patok-patok sebagai batas area situ. Kegiatan pariwisata baru pada tahap penyusunan masterplan wisata air Situ Gede yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi pada tahun 2017. Sedangkan, pengendalian banjir dilakukan melalui upaya pembersihan sistem jaringan drainase sekitar situ serta upaya kesadaran masyarakat secara mandiri melakukan ronda (khususnya di sekitar Situ Rawa Gede) dari para pembuang sampah liar yang mengotori badan situ.

Jika dianalisis dari hasil angket penelitian terkait pelaksanaan program-program kegiatan tersebut maka dapat diuraikan satu per satu sebagai berikut:

a) Normalisasi

Kegiatan normalisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan dan meningkatkan daya tampung air dari situ-situ tersebut melalui kegiatan pembersihan sampah dan pengerukan sedimentasi atau endapan lumpur yang ada di badan situ

agar daya tampung air situ bertambah. Berdasarkan angket penelitian dapat disampaikan bahwa proses normalisasi sudah dilakukan oleh BBWSCC bekerjasama dengan pemda Kota Bekasi sesuai pernyataan No. 22 dan 23 sebanyak 56 persen responden menyatakan sesuai. Sedangkan pelibatan masyarakat belum dilakukan dalam proses normalisasi ini, dimana sebanyak 72 persen responden menyatakan tidak sesuai terhadap pernyataan No. 24.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari BBWSCC Bapak Maulana Jaya, bahwa kegiatan normalisasi merupakan kewenangan pusat, dalam hal ini BBWSCC sebagai pelaksana. Hasil angket penelitian menunjukkan juga bahwa peran serta masyarakat belum dilibatkan dalam proses normalisasi ini, pengerjaannya lebih banyak melibatkan pihak ketiga (kontraktor). Informasi ini sebagaimana juga diungkapkan oleh Bapak Nasro Dwiprana (Kaur Ekbang Kel. Bojong Menteng) bahwa masyarakat belum banyak dilibatkan dalam pengelolaan Situ Rawa Gede.

b) Pengamanan Asset/Pemeliharaan

Kegiatan pengamanan asset sebagaimana yang telah disampaikan

Bapak Galuh, ST (Dinas PUPR Kota Bekasi) sudah dilakukan melalui pengukuran ulang dan pemasangan patok-patok batas area situ mengikuti aturan zonasi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi. Penetapan sistem zonasi situ pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kegiatan pada zona-zona tertentu disekeliling situ, agar kualitas fisik maupun kualitas air situ dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Oleh karena itu maksud dari penentuan sistem zonasi selain untuk menentukan dan memperjelas batas masing-masing zona pemanfaatan situ, juga bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi situ secara lestari.

Kegiatan pengamanan asset ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah keberadaan situ atau dikenal oleh masyarakat sekitar situ sebagai rawa. Banyak area lahan yang semula bagian dari sempadan situ sudah beralih fungsi jadi pemukiman penduduk, gudang lapak barang bekas dan tempat pemancingan ikan. Melalui kegiatan pengamanan asset ini juga langkah awal untuk menuju sertifikasi situ. Sebagaimana disampaikan Bapak Maulana Jaya (BBWSCC) bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan

upaya sertifikasi situ-situ di Indonesia dan hingga saat ini telah berhasil disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 4 situ, dimana salah satunya Situ Rawa Lumbu yang ada di wilayah Kota Bekasi. Pengukuran ulang Situ Rawa Gede juga sebagai bagian rencana dari program revitalisasi situ yang telah masuk agenda pemerintah pusat (BBWSCC). Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Bapak Galuh, ST dari Dinas PUPR Kota Bekasi dan juga disampaikan oleh Bapak Maulana Jaya dari BBWSCC.

c) Revitalisasi (Pembenahan)

Kegiatan revitalisasi bertujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi situ yang rusak akibat pendangkalan (sedimentasi), alih fungsi lahan, dan pencemaran. Upaya revitalisasi belum dilakukan baik oleh Pemda Kota Bekasi maupun BBWSCC yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan situ-situ. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Galuh, ST (Dinas PUPR Kota Bekasi) bahwa proses revitalisasi baru dalam tahap perencanaan. Begitu pula sebagaimana yang disampaikan Bapak Maulana Jaya (BBWSCC) bahwa proses revitalisasi memerlukan tahapan yang panjang dan melibatkan berbagai pihak mulai dari pengukuran ulang,

proses pembebasan lahan yang melibatkan pemda serta perlu ada kajian awal analisa dampak lingkungannya sebelum proses itu dilakukan. Dari informasi hasil wawancara sudah dapat terkonfirmasi bahwa revitalisasi Situ Rawa Gede belum dilakukan.

Berdasarkan hasil angket penelitian menunjukkan bahwa proses revitalisasi belum dilakukan baik oleh Pemda Kota Bekasi maupun BBWSCC sesuai pernyataan No. 34 dan 35. Dipertegas dalam pernyataan No. 37 bahwa revitalisasi atau pembenahan Situ Rawagede **belum** dilakukan dengan baik oleh Pemda Kota Bekasi dan BBWSCC dengan 72 persen responden menjawab sesuai.

d) Kegiatan Pariwisata

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu nilai tambah dari pemanfaatan keberadaan situ sebagai sumberdaya air. Situ selain berfungsi sebagai tempat tampungan air dan pengendali banjir, keindahan alam situ dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata air dengan memanfaatkan area sekitar situ sebagai tempat rekreasi tanpa mengurangi manfaat dan fungsi situ yang utama.

Sebagaimana disampaikan Ibu Elly Sulaella dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, pada

tahun 2017 ini sudah dilakukan kajian Penyusunan Masterplan Wisata Situ Rawagede. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Yudi Saptono dari Bappeda Kota Bekasi.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pariwisata, menurut hasil angket penelitian pada pernyataan No. 41, sebanyak 68 persen responden menyatakan sesuai bahwa Situ Rawagede akan dikembangkan oleh Pemda Kota Bekasi untuk pariwisata alam berbasis sumberdaya air. Pernyataan No. 42 menegaskan bahwa situ Rawagede belum dikembangkan oleh Pemda Kota Bekasi untuk pariwisata alam berbasis sumberdaya air (72 persen sesuai). Pernyataan No. 44 menegaskan bahwa masyarakat sudah mengetahui terhadap rencana pengembangan pariwisata ditunjukkan dari jawaban angket sebanyak 40 persen cukup sesuai. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangannya belum terlaksana, ditunjukkan dengan jawaban responden yang kontra negatif yaitu sebanyak 56 persen menyatakan kurang sesuai bila masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata situ Gede.

e) Pengendalian Banjir

Realisasi Perda No 13 tahun 2011 terhadap pelaksanaan kegiatan

pengendalian banjir melalui situ-situ sudah dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Bekasi melalui kegiatan pembersihan sistim jaringan drainase disekitar situ Rawagede agar aliran air menuju dan dari situ dapat berjalan dengan baik. Informasi tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Galuh, ST dari Dinas PUPR Kota Bekasi.

Menurut informasi dari Bapak Nasro Dwiprana (Kaur Ekbang Kel Bojong Menteng) dan Bapak H. Barus Ketua RW 02, masyarakat secara sadar dan mandiri melakukan monitoring terhadap pengendalian banjir dengan melakukan ronda secara bergantian terhadap para pembuang sampah liar yang sengaja mengotori badan situ.

Hasil angket penelitian terhadap pelaksanaan pengendalian banjir dijelaskan pada pernyataan No. 45, sebanyak 72 persen responden menyatakan sesuai terhadap pernyataan bahwa Situ Rawagede sebagai daerah retensi banjir telah mampu menampung air dikala hujan dan dapat mengurangi resiko banjir. Kemudian pernyataan No. 47, sebanyak 68 persen responden menyatakan sesuai bahwa Situ Rawagede **belum** efektif dalam pengendalian banjir secara berkesinambungan. Dan pernyataan

No. 48, sebanyak 48 persen responden menyatakan cukup sesuai dan 44 persen menyatakan sesuai bahwa Masyarakat sekitar Situ Rawagede berpartisipasi aktif dalam pengendalian banjir dengan turut serta memonitor banjir. Secara keseluruhan kegiatan pengendalian banjir sudah dilakukan dan melibatkan partisipasi masyarakat namun belum dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan.

Dengan demikian dari 5 (lima) program atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan strategi implementasi kebijakan yang belum terlaksana adalah kegiatan revitalisasi dan kegiatan pariwisata, yang baru tahap perencanaan saja. Namun demikian dari kegiatan yang sudah dilaksanakan belum optimal dalam implementasinya, terutama dalam pelibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mengambil bagian dalam pengelolaan situ Rawa Gede untuk keberlanjutan.

3) Alokasi Sumberdaya

Alokasi sumberdaya menyangkut rencana pendanaan dan desain kerjanya dalam menunjang strategi implementasi kebijakan dan pelaksanaan program-program kegiatan. Sampai akhirnya terciptakan *outcomes* yang menjadi indikator kesuksesan dari suatu kebijakan.

Dalam kaitannya dengan pengalokasian sumberdaya pada kebijakan Perda No 13 tahun 2011 ini terlihat belum ada pengaturan yang jelas. Hal ini terlihat dengan adanya penetapan program kegiatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, yaitu terkait kegiatan normalisasi dan revitalisasi situ. Ketidakjelasan kewenangan ini juga yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya seperti rencana pengembangan pariwisata berbasis sumberdaya air. Dalam hal ini pemda Kota Bekasi harus berkoordinasi dan minta ijin kepada pemerintah pusat dalam pemanfaatan dan pengelolaan situ Rawagede untuk kepentingan pengembangan destinasi wisata air.

Hambatan dalam pembiayaan pelaksanaan program kegiatan pariwisata juga sebagaimana diutarakan oleh Ibu Elly Sulaella (Dinas Pariwisata Kota Bekasi) bahwa untuk merealisasikan rencana pengembangan destinasi wisata air perlu pendanaan yang cukup besar, saat ini pemkot Bekasi dalam proses pengajuan baik ke pemerintah maupun Pemprov Jawa Barat.

Ketidakjelasan dalam pembiayaan program kegiatan dapat dilihat dari hasil angket penelitian pada pernyataan No. 15, sebanyak 68 persen responden menjawab sesuai bahwa pembiayaan pengelolaan Situ

Rawagede menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat (BBWSCC) yang bersumber dari APBN. Akan tetapi pada pernyataan No. 16, sebanyak 52 persen responden menjawab cukup sesuai bahwa pembiayaan pengelolaan Situ Rawagede menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang bersumber dari APBD. Ketika diajukan pernyataan No. 17 bahwa pembiayaan pengelolaan Situ Rawagede bersumber dari APBN dan APBD Kota Bekasi, sebanyak 52 persen responden menjawab cukup sesuai. Adanya ketidakjelasan kewenangan dan ketidaktahuan informasi mengakibatkan jawaban pernyataan yang tidak jelas (*clear*), dimana seharusnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku perlu ada koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pembiayaan program-program kegiatan tersebut.

Secara umum biaya pengelolaan Situ Rawagede belum terpenuhi sebagaimana pada pernyataan No. 20, sebanyak 68 persen responden menjawab sesuai.

Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik bukanlah suatu hal yang mudah karena berkaitan dengan hubungan antar lembaga pemerintah baik dari level paling atas hingga paling bawah, situasi politik, lingkungan sosial, dan lain sebagainya.

Penilaian terhadap *outcomes* yang menjadi indikator kesuksesan dari suatu kebijakan tidak terlepas dari keberhasilan strategi implementasi dan pelaksanaan program-program dengan baik yang sangat didukung oleh alokasi sumberdaya yang tepat, efisien dan efektif. Mengacu pada hal tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan Perda Nomor 13 tahun 2011 yang mengatur pemanfaatan ruang untuk sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir dinilai belum efektif dan berjalan optimal. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil angket penelitian yang menyatakan bahwa Situ Rawagede sebagai Aset Pemerintah telah dikelola dan terpelihara dengan baik, sebanyak 60 persen responden menjawab kurang sesuai dan pernyataan kontra negatifnya sebanyak 52 persen responden menjawab sesuai.

Sementara itu pada tabel 4.12 menyangkut penilaian outcome bahwa daerah dan masyarakat sekitar situ Rawa Gede telah aman dan terkendali dari banjir, sebanyak 52 persen responden menjawab kurang sesuai dan pernyataan kontra negatifnya sebanyak 56 persen responden menjawab sesuai.

Membahas lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan, seiring perkembangan waktu, berkembang teori yang lebih mengakomodir adanya faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan disamping hanya internal

pemerintah. Sejalan perkembangan konsep *good governance*, maka kontribusi partisipasi masyarakat dan pihak swasta dapat mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Salah satu yang dapat dijadikan rekomendasi penyempurnaan model Grindle adalah teori Kelembagaan Baru yang diberi nama New Institutionalisme in Economics and Sociology (NIES) yang digagas oleh NEE (Setiawan, 2017).

Pelaksanaan teori yang dikemukakan NEE ini, memberikan ruang adanya kerjasama dalam implementasi kebijakan antara pemerintah dengan pihak swasta (*public private partnership*). Keterlibatan swasta tidak hanya pada tataran memberikan masukan dalam proses formulasi kebijakan, akan tetapi lebih jauh dari itu swasta memiliki peran dalam implementasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Mekanisme ini biasanya dilakukan oleh pemerintah dikarenakan keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia dari pemerintah yang kurang mumpuni, maupun dalam kaitannya dengan *transfer of technology and knowledge* dari swasta ke pemerintah.

Dalam Perda No.13 tahun 2011 khususnya pada pasal 50 dan 51 dibuka ruang peran serta masyarakat didalamnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengelolaan dan pemanfaatan situ-situ. Bentuk peran serta masyarakat

dan keterlibatan swasta sangat dimungkinkan sepanjang tidak adanya privatisasi secara penuh dan tidak menutup ruang akses publik terhadap situ-situ tersebut. Dibukanya ruang keterlibatan masyarakat dan pihak swasta ini sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal keterbatasan pembiayaan. Untuk mengatur hal tersebut agar tidak bertentangan dan tidak berbenturan dengan peraturan perundangan maka pemerintah perlu menerbitkan aturan main yang mengatur kerjasama dalam implementasi kebijakan antara pemerintah dengan pihak swasta (*public private partnership*).

Kaitannya dalam pembagian peran, tugas dan kewenangan masing-masing pihak yang berketertingan perlu diatur dalam “*Manajemen kolaboratif*” yang mengakomodir keterlibatan pemerintah, pemerintah daerah dan peran serta masyarakat serta pihak swasta.

KESIMPULAN

Secara garis besar hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan situ berbasis masyarakat dalam rangka menuju situ yang berkelanjutan di Kota Bekasi belum berjalan efektif sehingga perlu beberapa upaya strategis yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berdampak luas. Untuk itu di dalam pengelolaan situ

diperlukan pendekatan “Manajemen Kolaboratif” (*collaborative management*) dan partisipatif dari semua pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air yang lestari dan berkelanjutan melalui pengaturan kerjasama kemitraan dalam tanggungjawab dan kewenangan antara pemerintah dan masyarakat/pihak swasta (*Public Private Parthnership*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaikuyini M., 2014. *Tourism Development Policy Versus Practice in Ghana* (European Scientific Journal, Vol 10 No. 7; 2014) h. 308
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Masterplan Pariwisata Situ Gede, 2017.
- George E Otiang’a, 2006. *Dampak Manusia Terhadap Ekosistem Danau* Grindle, S. Merilee. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- Izzatusholekha, dkk. 2015. *Kebijakan Pengelolaan Situ Terpadu sebagai wujud pembangunan berkelanjutan di Tangerang Selatan*. Konfrensi Internasional Malaysia – Indonesia Yogyakarta.
- Katarzyna et al., 2017. *Development of Drweckie Lake in Ostrada for Tourist and Recreational Purposes and Its Impact on the Burden to The natural Environment in the Shoreline Zone* (Pol. J. Natur. Sc., Vol 32; 2017) h. 105

- Małgorzata Kurlito, 2013. *Sustainable Management Of Lakes Taking Into Consideration The Tourism And Nature Conservation In Australia And New Zeland*. Polish journal of natural Sciences. Vol. 28 (1): 91-106, Y.
- Michael M. , Brient P., dan Jon Corbet, 2012. *Participatory Asset Mapping in the Lake Victoria Basin on Kenya* (Journal of the Urban and Regional Information System Association, vol 24 N0. 2, 2012) h.45
- Malgorzata K. 2013. *Sustainable Management of Lakes Taking into Consideration the Tourism and Nature Conservation in Australia and New Zeland* (Pol. J. Natur. Sec. Vol 28 (1).
- Mika Lehtolainen, 2010. *Public Infrastructure Investments and Their Rolw in Tourism Development in the Finnish Lake Region*, (Savonlinna Institute for Regional Dev. And Research Univ. of Joensuu)
- Moges G.W., 2004. *Community Based Tourism in Lake Tana Growth Corridor of the Amhara Region of Ethiopia* (Institute of Paleo-environment and Heritage Conservation, 2016).
- Sandor Nemethy, 2014. *Pengelolaan Berkelanjutan Danau di Dalam Hubungannya dengan Mitigasi Efek Perubahan Iklim, Pertanian dan Pembangunan Daerah Mikro Hijau Berdasarkan Produksi Energi Terbarukan* (Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA), 2014).
- Sam'un Jaja Raharja. 2008. *Manajemen Kolaboratif dalam Pengelolaan DAS Citarum*. Disertasi. FISIP UI.
- Septina Marryanti, 2014. *Pengelolaan Situ Berkelanjutan Sebagai Sumber Daya Air di Kota Depok*. 2014. (Jurnal Pembangunan Daerah Vol 5. Edisi I, 2014) h. 33.
- Stufflebeam, Daniel L and Anthony J Shinkfield. 2007. *Evaluation Theory, Models and Application*. San Fransisco:Jossey-Bass.
- Visi Danau Dunia (FDI, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 2004).
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33
- Undang Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- Undang Undang No: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Thn 2011 tentang RTRW Kota Bekasi
- Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 5 Thn 2016 tentang RDTR Kota Bekasi